

Evaluasi Implementasi Program Kartu Lansia Jakarta di RW.001 Kelurahan Ulujami

Nanda Saskia Putri, Wahyu Nurharjadmo

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Sebelas Maret
email : nandasaski Putri@student.uns.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Kartu Lansia Jakarta dan faktor yang menghambat pelaksanaan Program Kartu Lansia Jakarta di RW.001 Kelurahan Ulujami. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif analisis yang dilaksanakan di RW.001 Kelurahan Ulujami. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan penelitian. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen seperti buku, jurnal, dan dokumen tahunan. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan menggunakan teknik triangulasi. Analisis data menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Hurbermen yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori dalam penelitian ini menggunakan Teori Evaluasi Implementasi oleh Ripley untuk mengetahui evaluasi implementasi Program Kartu Lansia Jakarta di RW.001 Kelurahan Ulujami. Penelitian ini diperoleh hasil bahwa implementasi Program Kartu Lansia Jakarta di RW.001 Kelurahan Ulujami sudah cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari kemudahan akses informasi tentang pencairan dana, lokasi ATM DKI yang mudah ditemukan, pemberian pangan murah bersubsidi kepada lansia, akses pemeriksaan kesehatan secara gratis, dan pemberian bantuan proses pendaftaran dari pihak kelurahan apabila menemukan kesulitan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kouta penerima Kartu Lansia Jakarta yang terbatas, banyaknya data lansia yang belum masuk di dalam DTKS, adanya penyalahgunaan Kartu Lansia Jakarta, lansia yang memiliki kekurangan dalam hal penggunaan teknologi.

Kata Kunci: Evaluasi; Implementasi; Lansia

Abstract

This study aims to evaluate the implementation of the Jakarta Elderly Card Program and the factors that inhibit the implementation of the Jakarta Elderly Card Program in RW.001, Ulujami Village. The research method used a descriptive analysis approach which was carried out in RW.001 Ulujami Village. The data sources used are primary and secondary data. Primary data obtained through interviews with research informants. Secondary data is obtained from documents such as books, journals, and annual documents. Checking the validity of the data was carried out using a triangulation technique. Data analysis used Miles and Hurbermen's interactive analysis technique which consisted of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The theory in this study uses the Implementation Evaluation Theory by Ripley to determine the evaluation of the implementation of

the Jakarta Elderly Card Program in RW.001 Ulujami Village. The result of this research is that the implementation of the Jakarta Elderly Card Program in RW.001 Ulujami Village is quite effective. This can be seen from the ease of access to information regarding disbursement of funds, the easy location of DKI ATMs, the provision of cheap subsidized food to the elderly, access to free health checks, and the provision of assistance with the registration process from the village administration when encountering difficulties. While the inhibiting factors are the limited number of recipients of the Jakarta Elderly Card, the large number of elderly data that have not been included in the DTKS, the misuse of the Jakarta Elderly Card, the elderly who have deficiencies in terms of using technology.

Keywords: Evaluation; Implementation; Elderly

Pendaluhuan

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Saat ini jumlah penduduk lansia semakin meningkat seiring dengan majunya kesehatan di Indonesia, hal ini dikarenakan tingginya harapan hidup dan turunnya angka kematian. Oleh sebab itu, guna memanfaatkan pertumbuhan jumlah penduduk lansia dalam meningkatkan pembangunan bangsa, maka diperlukan adanya data mengenai kelanjutusiaan sebagai bahan pemetaan strategi kebijakan.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020 ada sebanyak 942,8 ribu lansia yang berada di Ibukota Jakarta. Diperkirakan jumlah tersebut akan terus mengalami peningkatan. Diperkirakan pada tahun 2021 akan adanya peningkatan menjadi 998,39 ribu jiwa dan 1,05 juta jiwa di tahun 2022. Selanjutnya, di tahun 2023 terus meningkat menjadi 1,1 juta jiwa dan terus bertambah pada tahun 2024 mencapai 1,17 juta jiwa. Berdasarkan data tersebut, untuk memenuhi kebutuhan mereka maka perlu adanya pengembangan di bidang pelayanan lansia. Hal ini bertujuan agar lansia dapat hidup dengan penuh kenyamanan dan keamanan, baik dilihat secara fisik maupun psikologis, seiring dengan adanya penurunan metabolisme dari dalam tubuh mereka (Jayani, 2021).

Berdasarkan data dari *Proportion of Selected Age Groups of World Population in 2021, by region* menunjukkan bahwa populasi lansia yang lebih dari 65 tahun di dunia adalah 10% dari total populasi, yang mana wilayah Eropa menempati posisi tertinggi dengan jumlah 19% dari total populasi di Eropa, disusul oleh Amerika Utara dengan jumlah 17 % dari total populasi di Amerika Utara, kemudian disusul oleh Oceania dengan jumlah 13% dari total populasi Oceania, sedangkan Asia yaitu 9% dari total populasi. Jumlah yang sama juga dimiliki oleh Amerika Latin dengan jumlah 9% dari total populasi Amerika Latin. Berbeda dengan Afrika yang memiliki jumlah populasi lansia yang jauh lebih sedikit daripada wilayah lainnya yaitu 4% dari total populasi Afrika.

Sementara itu, penduduk lansia di Indonesia jumlahnya kian meningkat dengan pesat (Putri, et al., 2019). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS)

memaparkan bahwa tercatat ada 29,3 juta penduduk lanjut usia (lansia) di Indonesia pada tahun 2021. Apabila diamati dari status ekonomi penduduk lansia sebagian besar (43,29%) tergolong sebagai rumah tangga dengan kelompok pengeluaran terbawah. Selanjutnya, terdapat rumah tangga dengan 40% menengah sekitar 37,4%, dan yang berada pada 20% teratas hanya sekitar 19,31%. Hal ini menunjukkan bahwa banyak lansia yang memiliki taraf ekonomi rendah. Oleh karena itu, diperlukan adanya perhatian khusus kepada lansia tersebut dikarenakan umurnya yang sudah tidak lagi sesuai untuk melakukan hal-hal produktif. Pemerintah setempat harus terus berupaya agar dapat memberikan akses layanan kesehatan kepada lansia yang rentan sekali terhadap serangan penyakit (Jayani, 2021).

Salah satu upaya Pemerintah Propinsi DKI untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok lansia adalah dengan menghadirkan Kartu Lansia Jakarta. Kartu Lansia Jakarta adalah suatu program pengentasan kemiskinan pada lansia yang kurang mampu dalam menunjang pemenuhan kebutuhan dasar bagi lansia tersebut (Dinas Sosial, 2021). Program ini pertama kali dimulai pada awal tahun 2018 ketika Anies Baswedan menjabat sebagai gubernur dan Sandiaga Uno sebagai wakilnya.

Kelompok lansia yang menjadi sasaran dalam program ini adalah lansia yang tidak memiliki penghasilan yang tetap (tidak stabil), lansia yang memiliki penghasilan yang sangat kecil, lansia yang memiliki sakit yang menahun dan hanya dapat berbaring di tempat tidur, serta lansia yang terlantar secara psikis dan sosialnya. Program ini memberikan tunjangan sebesar Rp 600.000 per bulan yang akan didapatkan setiap tanggal 5 per bulan dan disalurkan melalui bank DKI, dan diberikan masing-masing dalam bentuk kartu ATM yang dapat diambil melalui bank DKI terdekat. Bagi lansia penerima yang tidak dapat hadir secara langsung karena sakit keras dapat mewakilkannya pada anggota keluarga dengan catatan harus melampirkan surat kuasa yang ditulis oleh lansia tersebut.

Dasar Hukum Kartu Lansia Jakarta merupakan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 193 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lanjut Usia, dan dengan adanya sedikit perubahan pada beberapa pasal terkait. Pasal yang mengalami perubahan tersebut adalah mengenai tata cara permohonan bantuan sosial yang mengalami perubahan melalui Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018. Selain itu, hal yang melatarbelakangi dicetuskannya program bantuan tersebut adalah dukungan dari Gubernur DKI Jakarta yang mengatakan bahwa lansia merupakan manusia emas karena telah banyak melakukan kontribusi kepada negara, sehingga perlu diberikan perlindungan dan perhatian khusus dari negara.

Dari sisi jumlah penduduk dan jenis kelamin, keadaan di Kelurahan Ulujami dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Jumlah Penduduk Kelurahan Ulujami 2022

Data Penduduk Kelurahan Ulujami Tahun 2022			
Kewarganegaraan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
WNI	25.389	25.264	50.653
WNA	2	0	2
Jumlah			50.655

(Sumber: Data Kelurahan Ulujami, 2022)

Ulujami adalah salah satu wilayah kelurahan yang berada di daerah Jakarta Selatan dengan luas wilayah sekitar 1.71 Km², yang dibagi ke dalam 9 Rukun Warga (RW) dan 88 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 5.480 KK. Adapun jumlah penduduk terbaru di tahun 2022 tercatat sebanyak 50.655 jiwa, yang terdiri dari WNI (Warga Negara Indonesia) sebanyak 50.653 jiwa, dimana laki-laki sebanyak 25.389 jiwa, dan perempuan sebanyak 25.264 jiwa dan 2 jiwa Warga Negara Asing yang terdiri dari laki- laki.

Sebagian besar penduduk di Kelurahan Ulujami adalah pemeluk agama islam yakni sebanyak 95.11% (Data Kelurahan, 2022). Ulujami merupakan wilayah dari Kecamatan Pesanggrahan yang berada di Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan. Wilayah Ulujami merupakan daerah yang mempunyai segalanya, seperti dekat dengan pusat perekonomian yaitu ITC Cipulir Mas, lokasi yang strategis, dan kemudahan dalam akses transportasi dengan keberadaan jalur Busway Transjakarta. Selain itu, Ulujami juga dikenal sebagai wilayah yang memiliki banyak sekali asatidz (guru) yang masuk dalam kategori lanjut usia (Rohmani, 2020).

Dari sisi jumlah penduduk lansia dan jenis kelamin yang dapat dilihat berdasarkan usia, keadaan di Kelurahan Ulujami dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2
 Jumlah Penduduk Lansia dan Jenis Kelamin di Kelurahan Ulujami

No	Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	60-64	639	569	1208
2	65-69	410	364	774
3	70-74	243	240	483
4	75 keatas	172	170	342
Jumlah		1464	1343	2807

Sumber : Data Kelurahan Ulujami, 2022

Berdasarkan tabel jumlah penduduk lansia dan jenis kelamin di Kelurahan Ulujami menunjukkan bahwa dominasi lansia yang terdapat di Kelurahan Ulujami adalah lansia muda dengan rentang usia 60-64 tahun dengan jumlah 1208 jiwa lansia dan usia 65-69 tahun dengan jumlah 774 jiwa lansia. Sedangkan lansia dengan jumlah yang paling sedikit adalah lansia madya dan lansia tua yang berusia

di rentang usia 75+ tahun ke atas dengan jumlah 342 jiwa lansia. Dimana dari 2.807 jiwa yang terdata di Kelurahan Ulujami, hanya sekitar 689 jiwa lansia saja yang menjadi penerima manfaat dari Kartu Lansia Jakarta. Kelurahan Ulujami memiliki 9 RW (Rukun Warga), yang mana menurut peneliti, RW.001 lah yang harus dijadikan pertimbangan utama dalam menerima bantuan sosial apapun. Hal ini dikarenakan wilayah RW.001 tersebut merupakan daerah yang padat akan penduduknya dan rawan terjadinya banjir. Berdasarkan berita yang bersumber dari (www.liputan6.com) di tanggal 7 November 2021, banjir merendam wilayah RW.001 dengan ketinggian hampir setinggi 1 meter. Banjir yang melanda di RW.001 ini terjadi karena luapan dari Kali Pesanggrahan. Kali Pesanggrahan yang lokasinya berdekatan dengan wilayah RW.001 menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat yang tinggal dekat wilayah tersebut dikarenakan setiap meluap pasti akan ikut mengalami banjir bagi wilayah tersebut (Tristiawati, 2021).

Lokasi RW.001 yang berdekatan dengan sodetan Kali Pesanggrahan membuat seluruh RT (Rukun Tetangga) di RW.001 mengalami dampak banjir dari setiap kali turunnya hujan, sehingga RW.001 lah yang mengalami dampak banjir di hampir seluruh lingkungan RT (Rukun Tetangga) nya. Dampak dari banjir sangat dirasakan oleh lansia yang kurang mampu, khususnya juga bagi lansia yang tidak memiliki penghasilan maupun lansia yang memiliki penghasilan yang sangat kecil. Bagi lansia, akibat dari banjir adalah resiko terjadinya cedera atau jatuh saat terjadinya banjir. Selain itu, lansia juga dengan mudah terserang penyakit yang disebabkan dari terjadinya banjir (Kemensos, 2020). Dengan fakta diatas maka lansia di RW.001 Kelurahan Ulujami sangat membutuhkan bantuan sosial dari pemerintah setempat dalam hal ini adalah pemberian Kartu Lansia Jakarta.

Menurut data yang diperoleh dari Kelurahan Ulujami, sudah ada sekitar 64 Kartu Lansia Jakarta yang berhasil didistribusikan di RW.001 Kelurahan Ulujami. Akan tetapi, jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah lansia yang tinggal di lingkungan RW.001 yang jumlahnya mencapai 273 jiwa lansia. Kondisi yang demikian tentu berdampak pada upaya pencapaian dan peningkatan kesejahteraan dan kesehatan lansia, melalui implementasi program kartu lansia Jakarta. Untuk itu perlu kiranya dilakukan evaluasi atas implementasi Program Kartu Lansia Jakarta di RW.001 Kelurahan Ulujami Jakarta Selatan.

Menurut Michael Patton dalam Ritonga dan Rantung (2018:124) mengatakan bahwa evaluasi implementasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif suatu program ketika sudah diterapkan dan untuk mengetahui pada tingkatan yang mana program telah berhasil diterapkan. Effendi menyatakan bahwa tujuan dari evaluasi implementasi kebijakan adalah untuk melihat bagaimana beberapa variasi yang terdapat dalam indikator kinerja dapat menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu: (1) Bagaimana kinerja dari implementasi dalam kebijakan publik? (2) Terdapat variasi yang menyertai, apa saja faktor yang

menyebabkannya? (3) Bagaimana strategi yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dari implementasi kebijakan publik? (Dwijowijoto, 2003:94).

Lester dan Steward (dalam Dwijowijoto (2003:197) menyatakan bahwa ada empat kelompok evaluasi implementasi kebijakan, yakni:

1. Evaluasi proses : Evaluasi ini akan berkaitan dengan proses dari implementasi kebijakan.
2. Evaluasi impact : Evaluasi ini akan berkaitan dengan hasil dan pengaruh dari implementasi kebijakan.
3. Evaluasi kebijakan : Evaluasi ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan mengenai apakah benar hasil yang telah dicapai sudah mencerminkan tujuan yang diharapkan.
4. Meta evaluasi : Evaluasi ini berkaitan dengan evaluasi dari beraneka ragam implementasi kebijakan yang ada guna menemukan kesamaan-kesamaan tertentu.

Peneliti akan mencoba untuk melakukan evaluasi proses, yakni yang berkenaan dengan proses implementasi Kartu Lansia Jakarta di lingkungan RW.001 Kelurahan Ulujami Jakarta Selatan, seperti kegiatan dalam hal penetapan dan sosialisasi nama penerima Kartu Lansia Jakarta, dan pendistribusian kartu ATM kepada para lansia yang telah ditetapkan menjadi penerimanya. Michael Borus menyatakan jika evaluasi proses merupakan bentuk atau jenis evaluasi yang dimana akan memberikan jawaban atas bagaimana suatu program itu dapat berjalan (Ripley, 1985:24).

Ripley (1985:24) menyatakan bahwa evaluasi implementasi tersusun atas:

1. Deskripsi apa inputnya melalui bagaimana prosesnya dan apa outputnya sesuai dengan hasilnya;
2. Memberikan penjelasan terkait pola hubungan antar variabel yang sedang diamati dalam bentuk hubungan sederhana;
3. Memberikan petunjuk dalam bentuk beberapa pernyataan yang akan dibutuhkan dalam mengidentifikasi apa yang dapat atau tidak dapat dimanipulasi oleh pembuat kebijakan.

Ripley (1985) menegaskan bahwa terdapat beberapa tujuan evaluasi implementasi, yaitu:

1. Dapat menguraikan adanya realitas berupa pola;
2. Dapat memberikan penjelasan atas pola-pola yang muncul, seperti pengaruh, arah pengaruh, dan kausalitas (hal itu dilakukan apabila memungkinkan);
3. Dapat dilakukan dari implementasi dan dampak jangka pendek dengan tujuan untuk mengetahui apakah program telah mencapai hasil yang baik, atau baru saja mencapai sesuatu yang baik, dan kemudian menggambarkan bagaimana hasil yang dicapai dengan harapan yang diharapkan;
4. Dapat mendefinisikan dan memberikan rekomendasi atas berbagai pertanyaan-pertanyaan kebijakan yang dapat timbul di kemudian hari;
5. Dapat mengidentifikasi, memberikan beberapa saran, dan beberapa

rekomendasi terkait pertanyaan yang muncul, khususnya di bidang manajemen, serta beberapa pertanyaan yang cukup penting dampaknya terhadap konten kebijakan

Mazmanian & Sabatier mengungkapkan apabila meninjau masalah penerapan kebijakan merupakan suatu tanda dari bentuk usaha untuk mengetahui kejadian sebenarnya setelah ditetapkannya suatu program, yaitu berbagai peristiwa dan berbagai kegiatan yang terjadi setelah suatu kebijakan disahkan, baik dari sisi usaha pengadministrasiannya maupun dampak nyata yang ditimbulkan pada masyarakat atau kejadian tertentu lainnya yang telah terjadi (Putra, 2003:84).

Implementasi kebijakan ialah suatu jembatan yang akan mengubungkan antara perumusan kebijakan dengan hasil yang diharapkan. Anderson (1979:68) dalam spirit publik (2008:217) terdapat 4 macam aspek yang perlu dilakukan pengkajian dalam penerapan kebijakan, diantaranya:

1. Siapa saja yang dapat mengimplementasikan
2. Apa arti dari adanya proses administrasi
3. Bagaimana kepatuhan dari implementasi tersebut
4. Apa dampak yang ditimbulkan dari adanya pelaksanaan kebijakan

Di sisi lain, Ripley & Franklin (1986:54) dalam jurnal spirit publik (2008:217) berpendapat bahwa terdapat dua fokus perhatian pada suatu penerapan, yakni *compliance* (kepatuhan) dan *what's happening?* (apa yang terjadi). Dari *compliance* (kepatuhan) dapat menunjukkan apakah para implementor yang terlibat turut patuh pada prosedur atau standar peraturan yang berlaku, sedangkan untuk *what's happening?* (apa yang terjadi) akan mempertanyakan bagaimana proses implementasi yang telah dilakukan, apa saja bentuk hambatan yang muncul saat proses implementasi, apa yang berhasil dicapai pada saat proses implementasi, mengapa, dan lain-lain

Dengan demikian, untuk dapat mengetahui dampak dari disahkannya suatu program dapat melihat pada saat proses implementasi kebijakan. Selain itu, implementasi kebijakan bukan hanya terkait dengan aspek administratif saja, melainkan juga melakukan pengkajian pada faktor-faktor lingkungan yang akan turut serta mempengaruhi proses implementasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan beberapa hal yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul "Evaluasi Implementasi Program Kartu Lansia Jakarta di RW.001 Kelurahan Ulujami". Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut: Bagaimana implementasi program Kartu Lansia Jakarta di RW.001 Kelurahan Ulujami? Dan apakah faktor penghambat dari implementasi program Kartu Lansia Jakarta di RW.001 Kelurahan Ulujami?

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-analisis dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berusaha menggambarkan bagaimana evaluasi implementasi Program Kartu Lansia Jakarta. Sehingga, dengan digunakannya pendekatan ini, peneliti mampu menampilkan gambaran mengenai evaluasi implementasi Program Kartu Lansia Jakarta di RW.001 Kelurahan Ulujami.

Dalam pemilihan informan atau narasumber, menggunakan teknik pengambilan sampel dengan *purposive sampling*. Kriteria atau pertimbangan yang digunakan untuk memilih narasumber dalam penelitian ini yaitu didasarkan pada narasumber yang terlibat dalam proses evaluasi implementasi Program Kartu Lansia Jakarta yang ada di Kelurahan Ulujami, pihak-pihak tersebut yaitu: (1) Staff Kasie Kesra Kelurahan Ulujami. (2) Pendamsos Kelurahan Ulujami. (3) Ketua RW.001 Kelurahan Ulujami. (4) Semua Ketua RT di lingkungan RW.001. (5) Penerima Kartu Lansia Jakarta di lingkungan RW.001. Dalam pengujian validitas data, menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Serta dalam proses analisis data menggunakan model analisis interaktif oleh Miles dan Huberman (1984), yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Evaluasi implementasi menurut Ripley & Franklin, yakni kepatuhan (*compliance*) dan apa yang terjadi (*what's happening?*). Hasil penelitian tersebut akan dijelaskan seperti berikut ini:

1. Kepatuhan (Compliance)

Kepatuhan dari pelaksana program Kartu Lansia Jakarta sudah cukup baik dikarenakan dalam proses pendaftaran dan pengusulan dilaksanakan secara online dan kemudian akan dimusyawarahkan dengan baik oleh pejabat setempat untuk pemilihan lansia yang akan menjadi penerima Kartu Lansia Jakarta.

Pada saat penetapan seseorang yang akan menjadi penerima Kartu Lansia Jakarta membutuhkan proses yang panjang dan memerlukan berbagai macam persyaratan, seperti tidak memiliki rumah dengan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) 1 milyar, tidak mengkonsumsi air mineral yang bermerek, salah satu anggota keluarganya ada yang bekerja maupun bestatus pensiun dari seorang pegawai PNS, BUMN, maupun BUMD. Hal yang diharapkan dari yang akan menjadi penerimanya adalah lansia yang benar-benar berasal dari keluarga yang tidak mampu.

Terdapat berbagai macam tujuan yang hendak dicapai dari adanya program Kartu Lansia Jakarta, seperti untuk mensejahterahkan lansia

yang kurang mampu, yang mana sangat berguna untuk hari tua. Selain itu, dengan adanya bantuan ini dapat mengurangi beban kehidupan dan dapat membantu memenuhi kebutuhan primer. seperti halnya mendapatkan akses untuk membelanjakan uangnya di pangan murah dan akses pemeriksaan kesehatan secara gratis atau dalam hal ini dia mendapatkan fasilitas BPJS kelas 3 sehingga bisa memeriksakan kesehatannya di Puskesmas Kelurahan. Selain itu, besaran nominal yang diterima melalui Kartu Lansia Jakarta berjumlah Rp.600.000,- dan sudah sesuai dengan yang ditetapkan pada awal permulaan penetapan program tersebut.

Kini ada langkah yang diambil untuk menambah jumlah kuota penerima Kartu Lansia Jakarta, yaitu dengan mengurangi jumlah uang yang diterima oleh lansia. Yang pada awalnya berjumlah Rp.600.000,- menjadi Rp.350.000,-. Hal ini dilakukan agar lansia yang menjadi penerima Kartu Lansia Jakarta mengalami kenaikan, walaupun jumlah uang yang diterima mengalami penurunan.

2. Apa yang Terjadi (What's happening?)

Selama proses implementasi Kartu Lansia Jakarta perlu juga adanya perhatian dari para pemangku kepentingan. Hal ini selaras dengan yang dibutuhkan oleh lansia untuk memperoleh sumber informasi terkait Kartu Lansia Jakarta dan bagaimana cara lansia mengetahui dirinya sebagai penerima Kartu Lansia Jakarta yang baru serta besarnya nominal uang yang akan diterima oleh lansia pemegang Kartu Lansia Jakarta. Bagi lansia yang menjadi penerima baru Kartu Lansia Jakarta dapat mengambil kartu ATM KLJ di tempat yang telah ditentukan. Selain itu, pengambilan juga bisa dilakukan di Bank DKI melalui surat undangan yang diberikan kepada lansia yang dimaksud. Surat undangan ini berlaku pada penerima baru Kartu Lansia Jakarta. Dan dibalik waktu menunggu kemunculan nama-nama penerima Kartu Lansia Jakarta, pengurus RT tetap berupaya untuk mengusahakan agar nama-nama warganya masuk sebagai penerima Kartu Lansia Jakarta. Hal ini dinilai agar dapat mengurangi beban kehidupan yang mereka hadapi.

Bagi lansia yang ingin mendapatkan sumber informasi terkait program ini, khususnya terkait pencairan dana Kartu Lansia Jakarta tersebut disediakan oleh pihak RT, baik dengan *door to door* maupun lewat grup RT yang dibuat oleh pejabat setempat. Lebih lanjut, pencairan dana Kartu Lansia Jakarta nilainya Rp.600.000,- per bulan. Walaupun berbeda jumlah nominal yang diterima pada saat awal. Pastinya dalam keberjalannya dari jumlah nominal ini tetap sama, meskipun dirapel per tiga bulan atau per empat bulan sekali.

Berdasarkan temuan yang ditemukan oleh peneliti, implementasi dari Program Kartu Lansia Jakarta dihadapkan dengan berbagai *mindset* yang salah dari para warga, yakni terlalu bergantungnya para warga pada pemerintah, sehingga menimbulkan ketidakmandirian warga untuk menghidupi dirinya sendiri. Tapi di balik itu semua, program ini telah tepat guna dan tepat sasaran, khususnya bagi para lansia di RW.001 Kelurahan Ulujami. Dalam pengurusan program Kartu Lansia Jakarta dibantu oleh pihak Kelurahan, khususnya Dinas Sosial. Selain itu, dari Dinas Sosial juga melakukan rapat dengan pejabat wilayah setempat untuk membahas beberapa ketentuan yang menjadi kesepakatan bersama. Hal itu dilakukan agar pembagian kuota penerima Kartu Lansia Jakarta dapat merata di seluruh RT. Di sisi lain, ada juga pihak lain yang terlibat dalam pengimplementasian program Kartu Lansia Jakarta yakni Ketua RW, Ketua RT, Kapala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan, Kepala Satuan Persosial Kecamatan, dan Lurah sebagai pengawas.

Selain Dinas Sosial, pihak yang terlibat dalam pengimplementasian program Kartu Lansia Jakarta adalah Pusdatin. Pusdatin Jamsos adalah Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial yang berada dibawah naungan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Pusdatin ini punya pekerja yang bernama Pendamsos yang dapat membantu dalam melakukan pendaftaran di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Mereka akan membantu setiap orang yang mengalami kesulitan dalam pendaftaran, semisal gagal teknologi. Yang mana, warga bisa langsung datang ke kelurahan terdekat dengan menemui Pendamsos untuk mendaftarkan diri.

Apabila ada lansia yang tidak bisa melakukan tanda tangan pada dokumen-dokumen yang dibutuhkan, akan dibantu dengan menggunakan cap jempol. Lalu, apabila terdapat lansia yang tidak dapat berpergian ke bank karena *stroke* atau sakit yang tidak dapat bangun dari tempat tidur, bisa diwakilkan oleh anaknya dengan membawa surat kuasa.

Berbeda dengan RT yang lainnya, di lingkungan RT.008 Kelurahan Ulujami, dalam proses implementasi program Kartu Lansia Jakarta dilakukan dengan berbagai macam kegiatan, seperti: sosialisasi tentang menjaga kesehatan, penerapan gaya hidup yang baik untuk para lansia, dan melakukan kunjungan ke beberapa rumah lansia dalam lingkup wilayah RT.008.

Ada berbagai faktor penghambat dari implementasi program Kartu Lansia Jakarta di RW.001 Kelurahan Ulujami yakni: pertama, syarat dan

ketentuan yang sangat ketat sehingga tidak semua lansia mampu menjadi penerima Kartu Lansia Jakarta; kedua, adanya penyalahgunaan Kartu Lansia Jakarta oleh orang lain, seperti dari anak dan cucu karena keterbatasan kemampuan penggunaan mesin ATM dari lansia itu sendiri; ketiga, lansia yang memiliki kekurangan dalam penggunaan teknologi, khususnya dalam hal ini adalah pendaftaran online melalui DTKS untuk menjadi calon penerima Kartu Lansia Jakarta; keempat, lansia yang tidak memiliki *handphone* mengalami keterlambatan dalam menerima informasi; kelima, warga yang merasa dirinya kenapa belum terdaftar sebagai penerima Kartu Lansia Jakarta; keenam, warga yang penasaran dikarenakan belum ada kabar terkait kelanjutan pengajuan dirinya sebagai bakal calon penerima Kartu Lansia Jakarta; keenam, terkadang muncul rasa iri hati lansia yang tidak memperoleh Kartu Lansia Jakarta.

A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kartu Lansia Jakarta di RW.001 Kelurahan Ulujami

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu implementasi, yakni sikap pelaksana, komunikasi, dan dukungan kelompok sasaran. Hasil penelitian tersebut akan dijelaskan seperti berikut ini:

1. Sikap Pelaksana

Dalam hal ini sikap dari pelaksana akan sangat berpengaruh kepada implementasi program Kartu Lansia Jakarta. Pelaksana yang memiliki sikap yang baik akan memberikan kepuasan tersendiri bagi penerima layanan, dalam hal ini adalah para lansia. Lain halnya apabila pelaksana memiliki sikap yang buruk akan memberikan ketidakpuasan bagi pihak yang menjadi penerima layanan, dalam hal ini lansia penerima Kartu Lansia Jakarta.

Sebagai penerima layanan, lansia sangat membutuhkan bantuan dari para pelaksana. Hal demikian dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal karena lansia memiliki kekurangan dalam menggunakan teknologi, dalam hal ini adalah pendaftaran online melalui DTKS untuk menjadi calon penerima Kartu Lansia Jakarta. Hal ini pun dilakukan agar manfaat dan tujuan dari Kartu Lansia Jakarta ini dapat sesuai dengan harapan semua pihak.

2. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting antar pihak satu dengan pihak lainnya. Tanpa adanya komunikasi yang baik akan menciptakan gangguan komunikasi yang dapat mempengaruhi cara seseorang menerima, mengirim, memproses, dan memahami suatu persoalan. Dalam hal ini adalah bagaimana komunikasi dan koordinasi

yang akan digunakan dalam mendukung program Kartu Lansia Jakarta antar pihak satu dan lainnya serta bagaimana sosialisasi yang dilakukan guna mendukung program Kartu Lansia Jakarta.

Mengenai komunikasi dalam hal ini adalah dengan bersurat dari pihak dinas kepada kelurahan maupun kecamatan, kemudian dari instansi tersebut nantinya akan bersurat ke RT dan RW. Nantinya pejabat RT dan RW dapat menempel informasi tersebut di papan pengumuman RT RW. Dalam papan pengumuman tersebut memuat informasi terkait masa pembukaan pendaftaran DKTS selama 3 minggu atau 1 bulan. Selain itu, memuat informasi terkait pendaftaran yang bisa dilakukan secara mandiri atau datang ke kelurahan untuk dibantu dalam proses pendaftarannya. Penggunaan media cetak maupun non cetak juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi. Semisal melalui surat kabar, internet, maupun akun instagram dan facebook dari dinas sosial setempat.

3. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran adalah kelompok lansia penerima Kartu Lansia Jakarta. Sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada para lansia yang kurang mampu adalah dengan memberikan bantuan sebesar Rp.600.000 yang dinilai dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya selama satu bulan.

Selama ini, peran dari pihak RT sangat berpengaruh kepada lansia karena dalam informasi ini, pihak RT akan memberikan informasi ini kepada lansia. Semisalnya, apabila bantuan tersebut telah cair kepada lansia penerima Kartu Lansia Jakarta. Selain itu, pihak RT juga memberikan pemahaman kepada semua lansia bahwa yang akan menerima program Kartu Lansia Jakarta ini adalah lansia yang memenuhi syarat dan ketentuan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya iri hati di dalam hati lansia yang tidak menjadi penerima Kartu Lansia Jakarta.

Peran dari RT dalam program lansia sangatlah beragam, yaitu: mengumpulkan berkas untuk kemudian akan diberikan ke kelurahan lagi untuk diolah; memilih dan memilah mana yang harus menerima dan mana yang seharusnya tidak menerima walaupun dalam kondisi lansia; mengusahakan para lansia yang tidak berpenghasilan untuk memenuhi kebutuhan mereka agar mereka bisa lebih tenang karena bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri; melakukan pendataan melalui Dasa Wisma sehingga memperoleh informasi terkait jumlah lansia yang ada di sini; dan memfasilitasi para lansia yang hendak mendaftarkan diri di DKTS dengan dibantu oleh para dawis yang ada di setiap RT.

Cara di lingkungan RW.001 mensosialisasikan program Kartu Lansia Jakarta adalah dengan berbagai macam cara, yakni: forum warga yang ada setiap minggu untuk menginformasikan terkait program-program pemerintah apa saja yang akan diadakan, ada forum PGRT (Paguyuban Gotong Royong Rukun Tetangga), di sini setiap ada program dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan disosialisasikan di forum setiap bulan; dan ada di arisan PKK yang kebetulan di situ ada ibu-ibu lansia.

Penutup

Sebagai upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada dalam implementasi Kartu Lansia Jakarta di RW.001 Kelurahan Ulujami dan agar tujuan program dapat tercapai dengan maksimal, maka dapat disampaikan beberapa saran dalam penelitian ini:

1. Menyediakan kontak pengaduan pada tingkat kelurahan apabila ada warga yang memanfaatkan bantuan Kartu Lansia Jakarta bukan untuk kepentingan lansia, melainkan untuk dirinya sendiri ataupun orang lain.
2. Apabila ada lansia yang tidak memiliki *handphone* dapat dilakukan secara *door to door* ke rumah masing-masing lansia yang dituju.
3. Apabila terdapat lansia yang merasa bahwa dirinya mengapa belum ditetapkan menjadi penerima Kartu Lansia Jakarta dapat diberikan pemahaman bahwa hanya lansia yang memenuhi syarat dan ketentuan yang hanya dapat menerima bantuan tersebut dan semua juga dilakukan secara bertahap dan membutuhkan proses yang panjang.

Referensi

- Dinas Sosial. (2021). KLJ. Jakarta: Jakarta.Go.Id.
- Dunn, W. (1998). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dwijowijoto, R. N. (2003). Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Dwijowijoto, R. N. (2009). Public policy : teori kebijakan, analisis kebijakan, proses kebijakan, perumusan, implementasi, evaluasi, revisi, risk management dalam kebijakan publik, kebijakan sebagai the fifth estate, metode penelitian kebijakan. Jakarta: Elec Media Komputindo.
- Eka. (2015, September 15). Periode Lanjut Usia (Late Adulthood). Retrieved from Slide share: <https://www.slideshare.net/eka1400/periode-lanjut-usia>
- Ekowati, M. R. (2009). Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan atau Program, Cetakan ke IV. Surakarta: Pustaka Cakra.
- Gajda, R., & Jezewska-Zychowicz, M. (2021). The Importance of Social Financial

- Support in Reducing Food Insecurity among Elderly People. *Food Security*, 717-727.
- Handayani, S. (2020). Bantuan Sosial bagi Lanjut Usia (Lansia) di Masa Pandemi. *Journal of Social Development Studies*, 61-75.
- Islamy, I. (1984). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jayani, D. H. (2021). Jumlah Lansia Jakarta diproyeksi Capai 1,2 Juta Jiwa pada 2025. Jakarta: www.databoks.katadata.co.id.
- Jayani, D. H. (2021). Lansia Paling Banyak dari Ekonomi Termiskin pada 2021. Jakarta: www.databooks.katadata.co.id.
- Kemensos. (2020). Balai "Gau Mabaji" Tangani Lansia Korban Banjir di Kabupaten Bantaeng. Jakarta: kemensos.go.id.
- Kpessa-Whyte, M., & Tsekpo, K. (2020). Lived Experiences of the Elderly in Ghana: Analysis of Ageing Policies and Options for Reform. *Journal of Cross-Cultural Gerontology*, 341-352.
- Nurhajadmo, W. (2008). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda di Sekolah Kejuruan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*.
- Patton, Q. (2009). *Metode Evaluasi Kualitatif*. Sage Publications.
- Pramisita, A. A., & Utama, M. S. (2020). Efektivitas dan Pengaruh Bansos terhadap Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Lansia Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. *E-Jurnal EP Unud*, 780-809.
- Putri, D. K., Krisnatuti, D., & Puspitawari, H. (2019). Kualitas Hidup Lansia: Kaitannya dengan Integritas Diri, Interaksi Suami-Istri, dan Fungsi Keluarga. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 12(3), 181.
- Qomariah, M., Afifuddin, & Suyeno. (2020). Implementasi Program Bantuan Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia Terlantar (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Batu). *Jurnal Respon Publik*, 1-7.
- Ramadhan, K., & K.A, I. S. (2016). Hubungan Personal Hygiene dengan Citra Tubuh pada Lansia di Desa Sepe Kecamatan Lage Kabupaten Poso. *Jurnal Kesehatan Prima*, 1735-1748.
- Ritonga, N., & Rantung, D. A. (2018). Evaluasi Implementasi Pak Keluarga Di GKRI Jemaat Diaspora Cawang Jakarta Timur. *Jurnal Shanana*, 2(2), 107-130.
- Rohmani. (2020, Oktober 4). Ulujami Kec.Pesanggrahan Jakarta Selatan Fakta dan Sejarahnya. (Gojir, & Rancunk, Interviewers)
- Samodra, W., Purbokusumo, Y., & Pramusinto, A. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (1999). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA.

- Sutopo, H. (2002). Pengantar Penelitian Kualitatif . Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- Susanto. (2006). Metodologi Penelitian Sosial. Surakarta: UNS Press.
- Tristiawati, P. (2021). Banjir Hampir Setinggi 1 Meter Merendam Puluhan Rumah di Ulujami Jaksel. Jakarta: www.liputan6.com.
- Wahab, S. A. (1997). Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, S., & dkk. (1994). Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Winarno, B. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, B. (2008). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Jakarta: Media Pressindo.